

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Evianti Kharima¹, Ertien Rining Nawangsari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

evianti.kharima09@gmail.com¹, ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The government has attempted various programs to improve the welfare of the elderly, but there are still many cases related to the elderly, so assistance is needed from various parties to jointly help the government develop more innovative efforts to improve the welfare of the elderly. This research aims to understand how the implementation of the PKH Plus social assistance program meets the needs of elderly beneficiaries and creates better behavioral changes, poverty alleviation, and increases the standard of living of the elderly. This research uses a qualitative descriptive research method. Data collection used in this research was based on observation and interview techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. The research results show that the implementation of the PKH Plus program by the East Java Provincial Social Service has contributed to the success of improving the welfare conditions of the elderly in the districts/cities receiving assistance.

Keywords : PKH Plus, elderly welfare, social assistance.

ABSTRAK

Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, namun masih banyak kasus terkait lansia, sehingga diperlukan bantuan dari berbagai pihak untuk bersama-sama membantu pemerintah mengembangkan upaya yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi program bantuan sosial PKH Plus memenuhi kebutuhan penerima manfaat lanjut usia dan menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup lansia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKH Plus oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi dalam keberhasilan peningkatan kondisi kesejahteraan lansia di kabupaten/kota penerima bantuan.

Kata kunci : PKH Plus, Kesejahteraan lansia, bantuan social.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan kompleks seperti tingkat kejahatan yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kesehatan yang kurang memadai. Pemerintah telah melakukan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan

lansia, tetapi masih banyak kasus terkait lansia, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif guna meningkatkan kesejahteraan lansia (Pahlawan & Ratna, 2020). Menurut data dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penduduk lansia di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya dan diperkirakan akan mencapai 48,2 juta orang pada tahun 2035. Pemerintah telah berupaya keras untuk menangani fenomena penuaan penduduk. Kesejahteraan lansia telah diatur dalam UU No. 13/1998 tentang Perlindungan Lansia yang mengamanahkan pemerintah untuk memimpin, membimbing, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi peningkatan jaminan sosial bagi lansia, sehingga mereka dapat mencapai standar hidup yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di beberapa fasilitas kesehatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan bantuan sosial untuk lansia potensial dan non-potensial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, berupaya mendukung kebijakan tersebut dengan memberikan dukungan individual kepada lansia di wilayah tersebut dalam bentuk bantuan finansial sebesar Rp. 500.000 per bulan yang disalurkan empat kali dalam setahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Dukungan Sosial Non Moneter. Dalam implementasi PKH Plus di Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan PKH Plus. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah lembaga pemerintah yang fokus pada bidang sosial, bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan fungsi sosialnya serta memfasilitasi pencapaian tujuan dalam masyarakat.

Model yang efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini merujuk pada usaha untuk memberikan peluang dan keterampilan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka memiliki kemampuan dan keberanian untuk berpartisipasi aktif, mengungkapkan pendapat dan gagasan, serta memilih langkah terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Dalam esensinya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka (Mardikanto & Soebiato, 2013: 28, Bank Dunia). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program bantuan sosial PKH Plus memenuhi kebutuhan lansia penerima manfaat, menciptakan perubahan positif dalam perilaku, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Qamariah et al., 2020), metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dengan menggunakan alat penelitian. Jenis data untuk keperluan analisis meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan

pencatatan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lanjut Usia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan peneliti menggunakan model pendekatan teoritis terhadap implementasi kerja Mazmanian dan Sabatier (1979) yang dikutip dalam buku (Subarsono, 2011) Teori tersebut mengidentifikasi tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Pertama, karakteristik masalah (*Problem Traceability*) mengacu pada bagaimana permasalahan tersebut muncul, apakah mudah untuk diselesaikan secara teknis atau termasuk dalam kategori yang sulit untuk diatasi. Kedua, ciri indikator perubahan kebijakan (kapasitas struktur implementasi) menunjukkan kejelasan isi kebijakan yang memungkinkan pemerintah untuk merencanakan proses implementasi dengan jelas, merumuskan tujuan formal, serta memilih pendekatan yang sesuai. Ketiga, lingkungan kebijakan (variabel non undang-undang yang memengaruhi implementasi) termasuk kondisi sosial ekonomi, kemajuan teknologi, dukungan masyarakat terhadap kebijakan, sikap kelompok pendukung, tingkat komitmen, dan keterampilan dari pihak pengelola serta pelaksana kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan konteks munculnya konsep kebijakan pemberdayaan lansia dalam program PKH Plus serta beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat dijadikan landasan teori untuk penelitian lebih lanjut atau program pemberdayaan masyarakat. Beberapa teori yang dibahas pada bagian ini antara lain :

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Ramadhan & Hidir (2021), implementasi merupakan fase penting dalam siklus kebijakan. Implementasi sering dijelaskan sebagai langkah pelaksanaan atau eksekusi dari suatu rencana yang telah disusun secara rinci dan matang.

Menurut teori implementasi dari Mazmanian & Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Pertama, karakteristik masalah (*Trackability of the problem*) mengacu pada tingkat kesulitan teknis suatu permasalahan, apakah mudah atau sulit untuk dipecahkan secara teknis. Kedua, karakteristik kebijakan (*Ability of statue to structure implementation*) terfokus pada kejelasan isi kebijakan yang memungkinkan pemerintah untuk merencanakan proses implementasi dengan merinci tujuan formal dan memilih lembaga yang tepat untuk melaksanakannya. Ketiga, lingkungan kebijakan (*Non-statutory variables affecting implementation*) mencakup aspek sosial ekonomi, kemajuan teknologi, dukungan masyarakat terhadap kebijakan, sikap kelompok pendukung, serta tingkat komitmen dan keterampilan aparat dan pelaksana.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (Widodo, 2010), implementasi kebijakan adalah proses yang sangat penting. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika implementasinya tidak dipersiapkan dengan baik, maka tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai.

Menurut Hidayat et al. (2019), konsep "pemberdayaan" berasal dari kata "daya" yang berarti "kekuatan", diterjemahkan sebagai "memberdayakan". Dalam konteks ini, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada kelompok masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki kemampuan mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sa'adah (2017) menyatakan bahwa kelompok marginal, seperti lansia, termasuk kelompok yang sangat miskin, tunawisma, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki keterampilan. Oleh karena itu, mereka perlu diberdayakan. Memahami kebutuhan masyarakat adalah langkah awal dalam usaha pemberdayaan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk program khusus pemberdayaan lansia, seperti PKH Plus.

Program PKH Plus dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia

Pelaksanaan nawa bhakti satya menggambarkan komitmen pada bhakti 1 JATIM, yakni JATIM sejahtera yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial. Salah satu implementasinya adalah PKH Plus yang ditujukan kepada penduduk miskin di 38 kabupaten/kota, 664 kecamatan, 5674 desa, dan 2827 kelurahan. Program ini fokus pada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia yang terlantar, dan perempuan kepala keluarga. Anggaran dari subsidi provinsi membantu 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan akan meningkat mengikuti pendapatan APBD Provinsi Jatim. Dalam kontribusinya terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di Jatim, bantuan sosial PKH Plus ini sangat signifikan. Data BPS menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di Jatim dari 10,49 persen pada September 2022 menjadi 10,35 persen pada Maret 2023. Pada tahun 2023, program ini diperluas hingga mencakup 25 kabupaten dengan 55.000 penerima manfaat untuk tahap 1 hingga tahap 3, menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000 per tahun per orang melalui Bank Jatim. Implementasi program ini mengikuti pola Top-Down, dengan pemerintah pusat memberikan pedoman dan arahan sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses serta dampak positif dari program ini terhadap keluarga miskin di Indonesia.

Keberhasilan dari tiga parameter teori tersebut mencerminkan fokus utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus yang memperhatikan kebutuhan lanjut usia seperti yang dijelaskan oleh Zastrow dan Ashman (2013). Lansia memerlukan bantuan yang terus menerus dalam bentuk dukungan finansial dan sarana, sekaligus membutuhkan perhatian yang memadai dan penghargaan atas peran serta yang mereka berikan.

Secara khusus, tujuan implementasi bantuan sosial PKH Plus, sebagaimana tercantum dalam Pedoman umum PKH Plus tahun 2023 halaman 2, mencakup beberapa aspek :

1. Menjadikan kesejahteraan penerima manfaat sebagai prioritas dengan memberikan bantuan sosial dalam bentuk non-tunai untuk meningkatkan standar hidup.
2. Mengurangi beban biaya hidup dan meningkatkan pemasukan bagi penerima manfaat.
3. Mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan sosial.
4. Berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Tahapan implementasi Program PKH Plus ini dimulai dengan proses penentuan target sasaran penerima bantuan. Ada tiga kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan target sasaran:

1. Prioritas pemberian bantuan sosial PKH Plus diberikan kepada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
2. Ketersediaan data calon penerima manfaat menjadi penting karena penyaluran dana bantuan PKH Plus dilakukan secara elektronik melalui rekening mereka.
3. Kesiapan administratif yang lengkap, termasuk pengajuan dokumen resmi dari pemerintah untuk mendaftarkan nama-nama calon penerima manfaat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

Pelaksanaan program PKH Plus bagi lansia penerima manfaat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: a) Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan Bank Jatim sebagai penyalur dana. b) Dukungan dari masyarakat, di mana program PKH Plus yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, dengan lansia merasakan manfaat yang signifikan dari program ini. c) Komitmen aparatur pelaksana, yang memengaruhi kelancaran implementasi program PKH Plus oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Adapun faktor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan program menjadi kendala sebagai berikut: a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, di mana fokus PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih bergabung dengan bidang PKH Reguler, yang mengakibatkan ketergantungan dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial. b) Kendala anggaran, di mana alokasi dana yang digunakan untuk menjalankan program bantuan sosial masih terbatas karena bersumber hanya dari APBD dan digunakan juga untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. c) Keterbatasan fasilitas, terutama dalam kehadiran pada kegiatan Posyandu lansia yang belum merata, sehingga banyak lansia penerima manfaat yang tidak dapat hadir pada kegiatan Posyandu. Ini menjadi penting karena kegiatan Posyandu merupakan aspek utama dari pemeriksaan medis untuk lansia.

Dari analisis terhadap hasil riset guna memahami cara pelaksanaan kebijakan Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, model implementasi kebijakan teori implementasi dari Mazmanian & Sabatier (1979) . Teori yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), karakteristik kebijakan (*Ability of statue to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non statutory variables affecting implementation*).

a. Karakteristik dari Masalah

Karakteristik masalah terdiri atas:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang terjadi mengacu pada evaluasi mengenai jenis permasalahan yang dihadapi. Ini mencakup penilaian apakah permasalahan sosial tersebut termasuk dalam kategori yang bisa diselesaikan dengan relatif mudah secara teknis, atau apakah masalah tersebut merupakan jenis masalah sosial yang secara teknis sulit untuk diatasi. Kesulitan teknis pada proses implementasi PKH Plus terdapat pada sebagian lansia yang memiliki kondisi fisik yang sudah lemah, tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan untuk melakukan aktivitas diperlukan pembantuan. Adapun lansia yang memiliki permasalahan kesehatan yang cukup serius seperti sakit-sakitan, pikun, kesulitan mendengar dan lain sebagainya. Dikarenakan permasalahan tersebut termasuk permasalahan sosial yang secara teknis mudah diselesaikan maka dari itu sebagai langkah untuk mengatasi lansia yang memiliki permasalahan kesehatan maka upaya yang dilakukan pemerintah tidak terbatas pada pemberian bantuan sosial berupa pendistribusian dana beserta pengawasan penggunaannya oleh pendamping, namun juga meliputi tindakan lain. pengecekan kesehatan secara rutin yang tergabung dalam salah satu agenda dari PKH Plus yaitu Posyandu lansia. Namun, dikarenakan tidak semua lansia di Kabupaten/Kota mau untuk menghadiri fasilitas yang diberikan yaitu Posyandu lansia sehingga mempersulit pemerataan pemberian fasilitas kesehatan kepada lansia-lansia di seluruh Kabupaten/Kota penerima bantuan. Lalu tidak semua lansia yang ada dalam Provinsi Jawa Timur termasuk *eligible* sebagai penerima manfaat dikarenakan keterbatasannya anggaran dari pemerintah, yang mana dalam hal ini untuk menyeleksi lansia yang *eligible* setiap daerah penerima bantuan memiliki kuota yang sangat terbatas.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
Ini berhubungan dengan target atau kelompok yang menjadi fokus pembuatan kebijakan, yakni komunitas lokal yang bisa beragam atau seragam dalam sifatnya. Jika komunitas tersebut memiliki keseragaman, pelaksanaan program atau kebijakan akan lebih lancar. Beragamnya kondisi yang dialami oleh lansia tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakan program. Permasalahan yang paling sering ditemui yaitu penurunan kondisi kesehatan lansia yang dimana diklasifikasikan sebagai

lansia non potensial, namun tidak jarang ditemukan beberapa lansia yang masih produktif seperti bekerja di kebun maupun di sawah. Beberapa daerah juga memiliki bahasa komunikasi yang berbeda-beda seperti bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Untuk pelaksanaan program masyarakat maupun pemerintah tidak terhalang bahasa komunikasi dan terbantu dikarenakan terdapat penerjemah dari pendamping lansia PKH Plus.

3. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi
Pelaksanaan suatu program atau kebijakan menjadi lebih mudah ketika targetnya hanya terbatas pada sebagian kecil dari seluruh populasi atau hanya menyangkut kelompok tertentu, dibandingkan dengan mengenai keseluruhan populasi secara langsung. Saat ini terdapat 25 Kabupaten/Kota penerima manfaat PKH Plus dan merupakan Kabupaten/Kota yang terpilih dan sangat terbuka dengan adanya program dari pemerintah terkait peningkatan taraf hidup lansia dan kesejahteraan sosial. Hal ini diperuntukkan Kabupaten/Kota yang memiliki prioritas terhadap kemiskinan dan jumlah lansia agar program tepat sasaran.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
Ini berkaitan dengan perubahan dalam tindakan yang diinginkan dari kelompok tertentu yang menjadi fokus program yang ada. Suatu kebijakan atau program akan lebih mudah diterapkan jika lebih berfokus pada aspek kognitif dan memberikan pengetahuan. Adapun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait program PKH Plus ini tentunya memiliki dampak yang baik terutama bagi lansia penerima manfaat yang tergabung dalam salah satu bagian dari agenda PKH Plus yaitu P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) selain itu pendamping PKH Plus juga mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya promotif seperti pentingnya merawat dan memperhatikan keberadaan lansia.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Kejelasan Isi Kebijakan
Kesuksesan bantuan sosial sudah seharusnya tergantung pada kejelasan informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada semua petugas lapangan. Informasi terkait bantuan sosial bagi lansia penerima manfaat PKH Plus sudah tersampaikan dengan jelas oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, mencakup isi kebijakan, prosedur pelaksanaannya, serta tujuan yang harus dicapai. Ini memungkinkan petugas lapangan memahami inti kebijakan untuk diimplementasikan. Secara teoritis, kebijakan yang didasarkan pada teori telah teruji, di mana pelaksanaan program bantuan sosial PKH Plus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Sosial, dan Peraturan Gubernur.
2. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan

Dukungan dari teori mengokohkan suatu peraturan atau kebijakan karena telah diuji secara valid. Meskipun, dalam konteks pembuatan kebijakan, masalah sosial mungkin terlihat serupa secara umum di berbagai daerah. Namun, sebenarnya ada variasi kecil yang perlu diakui, sehingga untuk menangani perbedaan ini, cukup dengan melakukan modifikasi. PKH Plus didasarkan pada teori perlindungan sosial yang menekankan perlunya memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk melindungi mereka dari risiko-risiko sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, atau ketidakstabilan ekonomi. Dukungan teoritis tersebut menjadi landasan pemikiran dalam merancang dan melaksanakan PKH Plus, tetapi implementasi kebijakan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, politik, dan praktis di lapangan. Evaluasi berkelanjutan, penyesuaian, dan pemantauan terhadap keberhasilan serta dampak program sangat penting dalam menilai efektivitasnya secara riil.

3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
Tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan adalah aspek keuangan atau modal. Setiap program membutuhkan personel untuk melaksanakan tugas administratif dan teknis, memantau program, serta mengelola berbagai sumber daya yang semuanya memerlukan investasi finansial. Penyaluran bantuan sosial PKH Plus memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Timur bersumber pada dana APBD Jawa Timur, dan pendamping yang dilapangan masih tergabung dalam program PKH Reguler, yang mana dalam hal ini adanya kolaborasi yang bertujuan menyukseskan sekaligus memudahkan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
Kesuksesan implementasi suatu program bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai instansi terkait, baik dalam aras hierarki maupun antarbidang. Dalam implementasinya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan pihak-pihak yang mengawal implementasi dan dalam prosesnya diawali dari pendamping PKH Plus yang bertanggung jawab ke kabupaten penerima manfaat, kemudian Dinas Sosial Kabupaten ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
Badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan harus memiliki peraturan yang jelas dan konsistensi agar tidak terjadi kebingungan yang bisa menghambat kesuksesan implementasi. Masing-masing pendamping sebelum terpilih akan dilaksanakan tes dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan penyuluhan dan pedoman umum terkait implementasinya sebagai dasar acuan dan konsistensi aturan-aturan saat menjalankan. Didalam buku pedoman umum sudah memuat secara lengkap terkait dasar hukum, acuan, langkah-langkah, dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dijalankan.

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
Kesuksesan dalam menerapkan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen yang tinggi dari petugas yang melaksanakan tugasnya. Komitmen ini mencakup tingkat keseriusan dan ketekunan untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan atau peraturan berjalan lancar serta diterima dan diikuti oleh pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Tim teknis pelaksana dari unsur aparat pemerintahan dan perbankan pendukung program PKH Plus antara lain OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Bank Jatim, Dinas Sosial Kabupaten.
7. Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
Program akan meraih dukungan yang luas jika kelompok-kelompok di luar kebijakan, seperti masyarakat, turut aktif terlibat dalam kebijakan tersebut. Ini bukan hanya sekedar membuat mereka menjadi penonton atas kebijakan atau program yang diterapkan di daerah mereka, melainkan juga memberi mereka peran yang aktif dalam prosesnya. Pelaksanaan implementasi PKH Plus sangat bergantung kepada masyarakat terutama di daerah setempat penerima manfaat dimana PKH Plus juga melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

c. Lingkungan Kebijakan

1. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi
Masyarakat yang terbuka cenderung lebih menerima dengan baik program perubahan daripada yang masih tertutup. Begitu juga, keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada ketersediaan teknologi yang memadai. Penyuluhan mengenai program bantuan sosial PKH Plus dapat dimaksimalkan oleh penggunaan teknologi yang modern. Fokus utama dari ketersediaan teknologi adalah pada fasilitas dan infrastruktur yang didukung pelaksanaan program bantuan sosial PKH Plus pada Kabupaten/Kota penerima bantuan di Provinsi Jawa Timur dengan memadainya teknologi tentu akan menunjang kesejahteraan lansia. Seperti untuk penyaluran dananya sudah melalui Bank dan yang menjadi penyalurnya adalah Bank Jatim, Dan untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sudah menggunakan *google forms* yang dalam hal ini sudah memiliki keterbaruan dan meningkatkan transparansi dari implementasi program yang nantinya *output* dari hal ini untuk tabulasi nya jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pemberi rekomendasi kebijakan. Perhatian media terhadap kebijakan dan program bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur sudah cukup signifikan. Hal ini tercermin dari jumlah media yang semakin banyak dan rutin memberitakan tentang topik bantuan sosial PKH Plus dan Website dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga aktif dalam mengunggah agenda-agenda, informasi terkait penyaluran dan sarana untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan program.

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Dukungan dari masyarakat akan lebih besar jika kebijakan yang diterapkan memberikan insentif atau fasilitas yang mempermudah. Dukungan publik terhadap Program PKH Plus di Jawa Timur dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti pemahaman masyarakat tentang program tersebut, manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat, serta persepsi mengenai efektivitas dan transparansi implementasi program. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan publik terhadap PKH Plus:

- a. **Pemahaman dan Pengetahuan Publik:** Tingkat pemahaman masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan PKH Plus dapat memengaruhi dukungan mereka terhadap program ini. Komunikasi yang jelas dan efektif tentang bagaimana program ini membantu keluarga miskin dan rentan bisa meningkatkan dukungan publik.
- b. **Pengalaman dan Manfaat Langsung:** Penerima manfaat PKH Plus yang secara langsung merasakan manfaat dari program ini cenderung memberikan dukungan yang lebih besar.
- c. **Pengawasan dan Transparansi:** Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program dapat memengaruhi opini publik. Jika program ini dijalankan dengan transparan dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, masyarakat mungkin lebih cenderung mendukungnya.
- d. **Edukasi dan Kampanye Sosial:** Kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah kemiskinan dan peran PKH Plus dalam mengatasi masalah tersebut bisa memengaruhi tingkat dukungan publik.
- e. **Sikap Terhadap Bantuan Sosial:** Sikap umum terhadap bantuan sosial juga dapat memengaruhi dukungan terhadap PKH Plus. Beberapa orang mungkin mendukung bantuan sosial yang signifikan, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sudah berjalan cukup optimal. Akan tetapi secara keseluruhan implementasi PKH Plus tersebut belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan. Jika ditinjau dari tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: (1) Karakteristik dari masalah, terdapat satu indikator yang belum cukup berhasil dikendalikan (2) Karakteristik Kebijakan hasilnya berhasil diimplementasikan dan diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kebijakan (3) Lingkungan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan *stakeholder* kelurahan.

Pelaksana Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dan pemerintah dapat inovatif untuk memilih cara terbaik dalam menjalankan program, perlu mempertimbangkan situasi serta perubahan dinamis yang ada di lingkungan masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan target yang ditetapkan agar implementasinya menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- Audria, A., & Wahyuni, S. (2023). Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Bekasi. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(1), 9–15.
- Hidayat, B. W., Nuryadi, M. H., & Rusnaini, R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta). *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.20961/pknp.v14i1.34795>
- Pahlawan, P. Y., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2012-2017. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 1(2), 44. <https://doi.org/10.29103/jmpe.v1i2.882>
- Qamariah, M., Afifuddin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 14(4), 1–7.
- Ramadhan, A. H., & Hidir, A. (2021). Lansia Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. *Cross-Border*, 4(1), 166–180.
- Sa'adah, N. (2017). Menata Kehidupan Lansia: Suatu Langkah Responsif untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Lansia Desa Mojolegi Imogiri Bantul Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2), 49.
- Wijayanti, S., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 8(2).